

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru SD berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu seratus tiga puluh satu guru PNS dan seratus tiga puluh satu guru PPPK. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikansi ($0,018 < 0,05$) artinya terdapat perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru SD berstatus PNS dengan guru berstatus PPPK di kota Lhokseumawe. Dimana guru berstatus PPPK memiliki kesejahteraan subjektif lebih tinggi dibandingkan guru berstatus PNS. Hal ini dikarenakan guru berstatus PPPK memandang kepuasan hidup bukan hanya dari faktor ekonomi saja akan tetapi bekerja menjadi seorang guru pengajar adalah pekerjaan yang sangat mulia dan di dalam komponen kesejahteraan subjektif, kepuasan domain yang dianggap penting hal ini yaitu pekerjaan, maka pekerjaan menjadi kepuasan individu dalam kehidupannya.

Kata Kunci : Guru PNS, Guru PPPK, Kesejahteraan Subjektif

ABSTRACT

This research aims to look at the differences in subjective well-being between elementary school teachers with Civil Servant (PNS) status and Government Employee Work Agreement (PPPK) teachers in Lhokseumawe City. This research uses a quantitative approach with a comparative research type. The number of samples in this study was one hundred and thirty-one PNS teachers and one hundred and thirty-one PPPK teachers. Sampling in this research used a probability sampling method with a simple random sampling technique. The results of this research show that H_0 is rejected and H_a is accepted with a significance value ($0.018 < 0.05$), meaning that there is a difference in subjective well-being between elementary school teachers with PNS status and teachers with PPPK status in the city of Lhokseumawe. Where teachers with PPPK status have higher subjective well-being than teachers with PNS status. This is because teachers with PPPK status view life satisfaction not only from economic factors, but working as a teaching teacher is a very noble job and in the subjective welfare component, the satisfaction domain that is considered important is work, so work becomes individual satisfaction in his life

Keywords: Civil Servant Teachers, PPPK Teachers, Subjective Welfare